

**IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) BIDANG
SARANA INFRASTRUKTUR DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017-2019**

Oleh : Aandriannto

Aan.drianto2016@gmail.com

Pembimbing : Dr. Auradian Marta, S.I.P., M.A

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-6377

ABSTRACT

The Maju Inhil Jaya Village Program is a program of the Indragiri Hilir Regency Community and Village Empowerment Service (DPMD) implemented by the villages of the Indragiri Downstream district which aims to improve the welfare and employment opportunities of rural communities by encouraging independence in decision making and management of sustainable development. The problem in this study is that the implementation of the Advanced Inhil Jaya Village program in the field of infrastructure has not been optimal due to several factors supporting the performance of policy implementation that have not been maximized. The purpose of this study was to determine the Implementation of the Maju Inhil Jaya (DMIJ) Village Program in the Field of Infrastructure Facilities in Batang Tumu Village, Mandah District, Indragiri Hilir Regency in 2017-2019.

The purpose of this study is to analyze and also describe the implementation of the Advanced Inhil Jaya Village (DMIJ) program in the field of infrastructure facilities in Batang Tumu Village, Mandah District, Indragiri Downstream Regency in 2017-2019. This research is a type of descriptive research. Data collection techniques using interviews, observation and documentation as well as data analysis techniques in this study were qualitative.

The results of this study are that the implementation of the Advanced Inhil Jaya Village Program (DMIJ) in the field of infrastructure facilities in Batang Tumu village, Mandah sub-district, Indragiri downstream district in 2017-2019 has not been optimal, based on the findings of researchers in the field the influence of implementing actors and lack of budget. Regarding the others, it went well even though it was not without flaws.

Keywords: *Implementation, Policy Implementation, Policy Content, Policy Environment, DMIJ Program.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan desa adalah tata cara yang terjadi di desa dan merupakan komponen penting dari pembangunan nasional, yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan mata pencaharian. Dengan keadaan ekonomi daerah yang semakin mendukung kehidupan politik yang lebih demokratis, pembangunan pedesaan di Indonesia akan semakin sulit di masa mendatang. Inisiatif pembangunan pedesaan, bagaimanapun, benar-benar menghadapi banyak umpan balik atas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil mereka. Hal ini terjadi karena adanya anggapan di dusun bahwa program yang dipasarkan di bawah standar.

Selain itu, infrastruktur merupakan komponen kunci dari mesin ekonomi yang mendorong pembangunan perkotaan dan pedesaan. Perlu memiliki infrastruktur yang sangat baik. Infrastruktur dan fasilitas fisik memainkan peran penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Untuk mendukung beragam kegiatan pemerintah, komersial, industri, dan sosial dalam masyarakat dan pemerintahan, berbagai infrastruktur fisik sangat penting.

Dengan luas daratan 11.605,97 km², Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas wilayah 12.614,78 km². 10.740,16 km² tanah tersebut tunduk pada pasang surut. Menurut informasi dari Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki wilayah terluas kedua di Provinsi Riau. Namun, karena luas kabupaten dan anggaran pembangunan yang terbatas, sulit bagi

pemerintah kabupaten untuk pemeratakan pembangunan di seluruh wilayah Indragiri Hilir, terutama dalam hal pembangunan sarana prasarana desa.

Pengaruh yang ditimbulkan kepada masyarakat dan desa tampak secara signifikan. Program pemberdayaan masyarakat desa harus dilaksanakan sebagai jawaban atas rendahnya kemampuan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mengelola pembangunan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan izin penyelenggaraan program ini yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Dan Peraturan Bupati Indragitri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pogram Desa Maju Inhil Jaya.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan program pembangunan desa yang dikenal dengan nama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menggantikan undang-undang Desa sebelumnya dan semakin menegaskan Desa sebagai Desa Mandiri.

Perda Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 mengatur Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Tujuan umum program DMIJ adalah untuk meberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan desa.

Adapun tujuan khusus Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) adalah:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, pengawasan, dan pembangunan desa;
2. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dengan meberdayakan masyarakat dan sumber daya alam di setiap desa;
3. Meningkatkan akuntabilitas publik terkait keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
4. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dengan mengembangkan potensi sumber daya desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat;
6. Menyediakan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa serta insentif atau oprasional kelembagaan desa;
7. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar yang diprioritaskan masyarakat;
8. Meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif, *topdown* dan *buttom up*;
9. Mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan desa;
10. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengelolaan pembangunan;
11. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga;
12. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan;
13. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan;
14. Melakukan sinergi antar program dan sumber pendanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada.

Dalam Peraturan Bupati Indragitri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pogram Desa Maju Inhil Jaya tertuang tujuan khusus dari program ini adalah :

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;
2. Melembagakan pengolahan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya;
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan;

Jadi, dari tujuan khusus dari Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) ini memberikan beberapa permasalahan yang timbul yaitu:

1. Proses pelaksanaan pembangunan mengenai Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) akan lebih mencerminkan proses demokrasi apabila masyarakat dapat turut terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan terutama masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian pembangunan. Tetapi kenyataannya partisipasi dari masyarakat yang kurang mampu dan kelompok perempuan kurang aktif dalam memberikan pendapat dan sarannya pada kegiatan musyawarah. Berikut merupakan kehadiran masyarakat pada kegiatan musyawarah tahun 2017, 2018, dan 2019 untuk Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang dilaksanakan di Desa Batang Tumu.

Tabel Daftar Hadir Masyarakat

| Tahun | Jumlah Kehadiran | | Jumlah kartu keluarga |
|-------|------------------|-----------|-----------------------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| 2017 | 8 | 3 | 872 |
| 2018 | 11 | 3 | 882 |
| 2019 | 9 | 2 | 890 |

Sumber: Kantor Desa Batang Tumu, 2020

Berdasarkan tabel diatas tingkat kehadiran masyarakat kurang dari 30% dari yang telah diberi undangan oleh pihak penyelenggara.

2. Masyarakat Desa Batang Tumu diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian setiap tahap pembangunan yang dijalankan mengenai Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) ini. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, tetapi kenyataannya tidak banyak masyarakat yang memberikan tenaganya dalam Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) ini terutama dalam bidang infrastruktur.

3. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Batang Tumu serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan melakukan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Batang Tumu. Dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan prakarsa dan swadaya masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana social Desa Batang Tumu. prasarana yang sudah dibangun oleh perangkat desa misalnya seperti jalan yang tiap tahun diperbaiki tetapi cepat sekali mengalami kerusakan sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang tinggal di Desa Batang Tumu.

Tabel Pembangunan Dari Program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Batang Tumu Tahun Anggaran 2017-2019:

| Tahun Anggaran | Jenis Kegiatan | Lokasi/Sasaran | Target | Realisasi | | | Biaya |
|----------------|------------------------|---------------------|--------|-----------|-------|--------|----------------|
| | | | | P (M) | L (M) | T (M) | |
| 2017 | Rabat Beton Jalan Desa | JL. Cendana Perisai | 700 M | 256 M | 1 M | 0,12 M | Rp. 51.372.500 |
| 2018 | Semenisasi Jalan Desa | JL. Biawak Hulu | 1,5 KM | 100 M | 1M | 0,12 M | Rp. 24.365.000 |
| 2019 | Semenisasi Jalan Desa | JL. MTs | 50 M | 50M | 1 M | 0,12 M | Rp. 16.002.000 |

Sumber: Kantor Desa Batang Tumu, 2020

Berdasarkan tabel di atas pembangunan infrastruktur jalan 2017, 2018, dan 2019 tidak berjalan dengan maksimal. Di mana setelah diamati dilapangan pembangunan tidak mencapai target yang sesuai dengan perencanaan. Dapat dilihat dari data diatas bahwa Rabat Beton Jl. Cendana perisai hanya 256 Meter, padahal ditargetkan 700 meter. Juga pada tahun 2018 Semenisasi Jl Biawak Hulu tidak mencapai target 1,5 kilometer hanya terealisasi 100 meter. tidak hanya itu, berdasarkan pengamatan lapangan dan media online desa, pembangunan jalan hanya mulus pada tahun pertama dan pada tahun berikutnya kembali rusak sehingga yang demikian itu menjadi buah bibir masyarakat setempat. ketika saya melakukan observasi yang menjadi keinginan masyarakat tidak sesuai prioritas yang dibangun oleh pemerintah. Padahal yang diinginkan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur Jembatan, Dermaga atau Pelabuhan, tapi kenyataan dilapangan hanya memprioritaskan pembangunan semenisasi jalan yang belum maksimal, tulis salah satu media Amanah Rakyat.

Dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Mandah, Desa Batang Tumu adalah salah satu desa yang melaksanakan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Penelitian ini difokuskan pada Desa Batang Tumu karena berbagai permasalahan berada di Desa Batang Tumu.

Pada dasarnya program ini bertujuan untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa, selain itu juga membantu masyarakat untuk mengembangkan wilayahnya, memberikan arahan, dan mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilakukannya sehingga apa yang dilakukan dapat terarah dengan baik. sesuai dengan yang direncanakan.

Pada dasarnya program ini bertujuan untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa, selain itu juga membantu masyarakat untuk mengembangkan wilayahnya, memberikan arahan, dan mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilakukannya sehingga apa yang dilakukan dapat terarah dengan baik. sesuai dengan yang direncanakan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2019.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah Untuk Mengetahui Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2019.

KERANGKA TEORI

Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi adalah nama strategi implementasi kebijakan Merille S. Grindle dari tahun 1980. Menurut Grindle, proses pencapaian hasil (yaitu, apakah tujuan yang diinginkan tercapai atau tidak) dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan sebuah implementasi kebijakan publik. Hal ini terlihat dari dua fakta berikut:

1. Mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan apa yang diputuskan dengan mengutip tindakan kebijakan, dilihat dari prosedurnya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini dinilai dengan memperhatikan dua unsur, yaitu:
 - a. Dampak pada masyarakat secara personal maupun kelompok.
 - b. Besarnya perubahan yang terjadi, serta penerimaannya oleh populasi sasaran.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy* (1980: 5).

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
Kaitannya dengan berbagai kepentingan yang harus dilibatkan agar dapat diimplementasikan dalam berbagai cara yang berbeda, dan kami ingin memahami lebih banyak tentang kepentingan tersebut.
- b. *Tipe Of Benefit* (tipe manfaat)
Tujuan dari isi kebijakan adalah untuk mengklarifikasi bahwa suatu kebijakan harus memiliki berbagai keunggulan yang menunjukkan dampak yang menguntungkan dari pelaksanaannya.
- c. *Extent Of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
Setiap kebijakan memiliki tujuan yang harus dicapai; isi kebijakan kemudian menunjukkan seberapa besar perubahan yang akan dilakukan dengan melaksanakan kebijakan pada skala yang sangat spesifik.
- d. *Site Of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
Lokasi pengambilan keputusan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan harus dijelaskan pada bagian ini karena sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan.
- e. *Program Implementer* (pelaksanaan program)
Suatu program atau kebijakan harus didukung oleh pelaksanaan kebijakan yang mampu dan kompeten agar berhasil.

f. *Resources Committed* (sumberdaya yang harus digunakan)

Agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan sukses, juga harus didukung oleh sumber daya pendukung.

Sedangkan context of implementation (lingkungan kebijakan) menurut Grindle dalam Nawawi (2009:142) mencakup:

- a. *Power, Interest and Strategis Of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat). Untuk membuat suatu kebijakan lebih mudah untuk dieksekusi, penting untuk mempertimbangkan kekuatan dan kekuatan kepentingan yang bersaing serta taktik yang digunakan oleh berbagai pemain. Sangat mungkin bahwa perangkat lunak yang ingin Anda jalankan tidak akan berfungsi jika ini tidak dipertimbangkan dengan baik.
- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim berkuasa). Kesuksesan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh konteks di mana ia dipraktikkan, sehingga suatu kebijakan juga akan dipengaruhi oleh sifat-sifat institusi.
- c. *Compliance and Responsiveness* (pemenuhan dan daya tanggap)
Tingkat kepatuhan dan reaksi dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan dimaksudkan untuk diperjelas pada fase ini karena diyakini signifikan dalam proses implementasi. (Leo Agustino, 2016)

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui informan penelitian dan dokumen.

| No | Informan | Keterangan |
|--------|---|------------|
| 1. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 1 |
| 2. | Kepala Desa Batang Tumu | 1 |
| 3. | Anggota BPD Desa Batang Tumu | 1 |
| 4. | Kaur Pembangunan Desa Batang Tumu | 1 |
| 5. | Pendamping Desa | 1 |
| 6. | Tokoh Masyarakat Desa | 3 |
| JUMLAH | | 8 |

Tabel Informan Penelitian

Sumber: olahan penulis, 2021

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian Bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur Desa Bang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Mandah Tahun

2017-2019. Dalam hal ini program diatas sangat penting bagi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penelitian ini dibidang sarana infrastruktur desa tersebut.

Dalam hal pelaksanaan program ini sebagai dasar untuk menjalankan program tersebut maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan dan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Program Desa Maju Inhil Jayadan Juga Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya. Oleh karenanya implementasi dari program dibidang infrastruktur desa tersebut masih jauh dari sempurna atau bisa di katakan belum optimal dikarenakan sesuatu dan lain hal. Maka peneliti menerapkan teori Merillee untuk mempelajari lebih lanjut tentang fenomena ini. Proses pencapaian hasil (yaitu, apakah tujuan tercapai atau tidak) dapat digunakan oleh Grindle untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan, dan tingkat implementasi yang terdiri dari konten dan konteks kebijakan (*Content Of Policy* dan *Context Of Policy*) juga berperan peran.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) yaitu:

1. *Content Of Policy* (Isi Kebijakan)

1.1 *Interest Affected* (Kepentingan Yang Terpengaruh Oleh Kebijakan).

Dalam pelaksanaan program desa maju inhil jaya bidang sarana infrastruktur desa maju inhil jaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Program Desa Maju Inhil Jaya dan juga Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya.

Berikut Tabel Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Batang Tumu Tahun Anggaran 2017-2019:

| Tahun | Kegiatan | Lokasi | Realisasi | Biaya |
|-------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|
| 2017 | Rabat beton jalan desa | Jl.Cendana Perisai | 256 M | Rp. 51.372.500 |
| | Sarana air bersih | Jaringan perpipaan air bersih | | Rp. 33.572.000 |
| 2018 | Semenisasi jalan desa | Jl. Biawak Hulu | 100 M | Rp. 24.365.000 |
| 2019 | Semenisasi jalan desa | Jl. MTS | 50 M | 16.002.000 |

Sumber: Kantor Desa Batang Tumu

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa yang terlaksana tidak sesuai dengan usulan yang diusulkan oleh masyarakat terlihat dari hanya pembangunan rabat beton, pengelolaan sarana air bersih, dan semenisasi jalan desa yang menjadi perhatian prioritas kepala desa itupun pembangunannya belum sesuai target. Padahal target pembangunan Jl. Cendana 2017 target 700 M, 2018 Jl. Biawak Hulu 1,5 Km Dan Jl. MTS 50 M juga sudah kembali rusak.

Pada poin kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dapat disimpulkan bahwa pengusulan Pelaksanaan Program DMIJ Bidang

Sarana Infrastruktur diputuskan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa. Dapat dipahami bahwa Kepala Desa dalam hal ini memiliki pengaruh yang kuat dari pada aturan yang harus dijalankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2105 Tentang DMIJ dan Petunjuk Teknis Dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Oprasional Program Desa Maju Inhil Jaya. Tentunya hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang PTOP DMIJ bahwa seharusnya usulan yang menjadi prioritas masyarakat yang berdasarkan musyawarah yang mesti di perhatikan, tapi kenyataannya malah usulan prioritas ditentukan dan dipengaruhi oleh pemerintah desa tersebut.

1.2 Type Of Benefits (Tipe Manfaat)

Program desa maju inhil jaya merupakan perluasan dari visi dan misi Bupati terpilih, dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Untuk Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Dengan memupuk kemandirian dalam pengambilan keputusan dan mengawal pembangunan berkelanjutan, Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) berupaya meningkatkan kesejahteraan dan prospek kerja masyarakat desa.

Program desa maju inhil jaya ini khususnya bidang sarana infrastruktur sudah bermanfaat bisa membangun semenisasi jalan, tetapi dalam hal ini

belum maksimal bisa terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat sesuai dengan tujuan dari program ini, artinya masih belum maksimal.

1.3 Extent Of Change Envision (Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai)

Tentunya harapan dari Program Desa Maju Inhil Jaya Ini Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis.

Berikut gambar Pelabuhan Dan Pembangunan Jalan Desa Batang Tumu:



Dapat dilihat bahwa diatas merupakan pelabuhan pribadi milik Bapak H. Iwan yang digunakan masyarakat Desa Batang Tumu yang belum menjadi perhatian khusus pemerintah Desa dan juga pembangunan jalan yang belum maksimal serta belum selesai sesuai target.

Berkenaan derajat perubahan yang diinginkan harapan maupun target yang ingin dicapai khususnya program DMIJ di bidang sarana infrastruktur belum optimal

terlaksana berdasarkan observasi peneliti dan hasil wawancara diatas.

1.4 Site Of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Proses pengambilan keputusan kebijakan program desa inhil jaya lanjutan, khususnya di bidang fasilitas infrastruktur desa, juga dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Kebijakan program desa inhil jaya maju merupakan tempat pengambilan keputusan, khususnya di bidang fasilitas infrastruktur desa, pada permasalahan pembuatan keputusan pemangku pelaksana kebijakan pembangunan jalan program desa maju injaya ini.

Dalam hal ini pemerintah desa selaku pelaksana sangat mempengaruhi karena tidak terlalu serius memperhatikan aspirasi masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat setempat pembangunan apa yang semestinya menjadi prioritas dibangun dan diperlukan masyarakat sesuai yang diamanatkan didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional.

1.5 Program Implementor (Pelaksana Program)

Implementasi program suatu kebijakan sangat penting karena berfungsi sebagai katalisator atau instrumen untuk mencapai keberhasilan yang telah ditentukan pada awal proses pembuatan kebijakan. Dari segi kebijakan, dapat dikatakan bahwa pelaksana ini adalah pemasok dan penyedia layanan untuk

lingkungan.

Pelaksana terkait program desa maju inhil jaya ini khususnya bidang sarana infrastruktur memang dari desa itu sendiri dilaksanakan secara otonomi desa, tetapi dalam hal ini memang bisa ditarik benang merah bahwa penentuan pelaksana sangat kurang dari prioritas yang sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat apa yang musti dibangun dan dalam pelaksanaan tugas masih belum sesuai prosedur dan juga belum optimal.

1.6 Resources Committed (Sumber-Sumber Daya Yang Ingin Digunakan)

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan tentunya perlu didukung dengan sumber-sumber daya yang dapat berguna untuk mensukseskan suatu keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menggambarkan bahwa, sumber daya manusia didesa batang tumu yang merupakan pelaksana program desa maju inhil jaya ini kurang berkompeten dilihat dari pengelolaan besaran anggaran yang dikucurkan dari pemerintah daerah melalui anggaran dana desa dan bagi hasil pajak retribusi.

**Berikut Tabel Besaran
Anggaran program DMIJ Desa Batang
Tumu Tahun 2017-2019:**

| Tahun | (ADD) Dari Program DMIJ | Anggaran DMIJ Bidang Sarana Infrastruktur |
|-------|-------------------------|---|
| 2017 | Rp. 683.331.000 | 84.944.500 |
| 2018 | Rp. 616.758.700 | 24.365.000 |
| 2019 | Rp. 778.739.000 | 16.002.000 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa INHIL Dan Kantor Desa Batang Tumu.

Berdasarkan besaran jumlah anggaran program desa maju inhil jaya diatas sungguh terbatas anggaran yang bisa dikelola oleh pemerintah desa khususnya sebagai pelaksana program desa maju inhil jaya. Karena kegiatannya bukan hanya digunakan untuk bidang pembangunan ada juga keperluan yang lain seperti penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran yang hanya digunakan Pemerintah desa sebagai pelaksana dari anggaran ini bidang infrastruktur pembangunan di tahun 2017 Rabat beton hanya 256 m dengan biaya 51.372.500, sarana air bersih dengan biaya 33.57200, 2018 semenisasi jalan 100 m 24.365.000 semenisasi jalan juga di tahun 2019 50 m 16.002.000 yaitu Jalan Mts.

Sumber daya yang digunakan belum optimal diantaranya sumberdaya manusianya dalam mengelola anggaran yang terbatas tersebut, juga seharusnya

selaku pemerintah desa khususnya kepala desa mustinya harus selalu hadir didesa sehingga bisa mengetahui keinginan masyarakat desa terkhusus dalam hal pembangunan dalam program ini apa yang musti di prioritaskan dengan keterbatasan jumlah anggaran.

2. Context of Policy (Lingkungan Kebijakan)

2.1 Powet, Interest, and Strategy Of Actor Involved (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, Dan Strategi Dari Aktor Yang Terlibat)

Pada bagian ini melihat dari dari pelaksanaan program desa maju inhil jaya bidang infrastruktur memiliki strategi dan kepentingan yang mandahului umum untuk lancarnya dalam menjalankan suatu peaksanaan kebijakan publik.

Strategi yang dilakukan pelaksanaan program sudah dilaksanakan tetapi belum optimal dikarenakan keterbatasan anggaran dan juga perhatian pelaksana atas apa yang sudah dibangun untuk diselesaikan terlebih dahulu seharusnya baru kemudian di bangun pembangunan yang lain.

2.2 Institution and Regime Characteristic (Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa)

Bagian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik suatu institusi yang juga akan mempengaruhi suatu kebijakan karena lingkungan di mana suatu kebijakan dijalankan mempengaruhi keberhasilannya.

Karakteristik lembaga pelaksana dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Program

Desa Maju Inhil Jaya dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tentang Petunjuk Teknis Oprasional yaitu mulai dari Undang-Undang hingga ke tingkat desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa Batang tumu berperan penting dalam mempengaruhi program DMIJ ini khususnya bidang sarana infrastruktur dalam pengambilan keputusan, terbukti pada pembangunan semenisasi jalan desa desa yang diusulkan oleh Kepala Desa. Sehingga pengaruh Pemerintah Desa berperan kuat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan persoalan imlementasi program tersebut.

2.3 Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Tingkat kepatuhan dan reaksi dari pelaksana dalam bereaksi terhadap suatu kebijakan dimaksudkan untuk diperjelas pada tahap ini karena faktor-faktor tersebut dipandang sangat penting dalam proses implementasi suatu kebijakan.

Dalam hal ini juga merupakan langkah krusial dalam proses pemberlakuan suatu kebijakan, artinya sejauh mana tingkat kepatuhan dan tanggapan dari para pelaksana kebijakan merupakan tindakan nyata dari pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam Program Desa Inhil Jaya Maju, khususnya di bidang sarana prasarana desa.

Tingkat kepatuhan pelaksana program sudah baik. Hal ini dapat di lihat sudah terlaksananya program DMIJ ini khususnya bidang sarana infrastruktur desa hanya saja pelaksanaan program

tersebut yang dalam hal ini belum maksimal

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Implemenasi Program Desa Maju Inhil Jaya Bidang Sarana Infrastruktur Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2019 belum maksimal karena ditemukan persoalan terkait masih banyaknya pembangunan yang belum dibangun sesuai target, dari program itu tidak selaras dengan apa yang menjadi prioritas keinginan masyarakat dan juga yang menjadi inti dari persoalan terkait diatas karena terbatasnya anggaran dari program desa maju inhil jaya itu sendiri.

Dengan terjadinya ketidak optimalan dalam pembangunan, membuat masyarakat memiliki keinginan atau harapan yang penuh untuk keberlangsungan Program Desa Maju Inhil Jaya ini kedepan nya agar program tersebut dapat dirasakan dan dinikmati bersama sesuai dengan tujuan dan manfaat dari program itu sendiri. harapan masyarakat pada umumnya yaitu menginginkan usulan-usulan yang dijadikan skala prioritas pembangunan harus sesuai pada prioritas kebutuhan masyarkat butuhkan, dan lokasi pembangunan yang merata. Lalu harapan masyarakat terhadap anggaran adalah terjadi keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat desa. Serta terjalannya koordinasi yang baik antara Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) dalam upaya pemeliharaan hasil pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmadi Rulan. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: 2016.

Bungin Burhan . (2015). *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Media Grup.

Bungin Burhan . (2015). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Media Grup.

Bungin, B. (2011). *penelitian kualitatif: komunikasi ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. jakarta: kencana.

Leo Agustino. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).

Purwanto,E.A. & Sulistyastuti, D.R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

nasution. (2011). *metode research*. jakarta: PT. bumi aksara.

Prastowo Andi. (2016). *metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. yogyakarta: Ar-ruzz media.

Kencana,I. (2015). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Bumi Aksara.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Widodo. (2006). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Siduarjo: Bayumedia Publishing.

Artikel Ilmiah

Jurnal:

Ayu Amalia (2017). Pelaksanaan program desa maju inhil jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur Di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015. JOM FISIP VOL 4, NO 2.

Khairi,A. & Amin. (2018). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017. JOM FISIP Vol 5, Edisi II.

Adhi Susanto (2017). Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. JOM FISIP VOL 4, NO 1

Utomo, W. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perumahan Kota Banjarbaru. Jurnal Kebijakan dan Administrasi publik JKAP. Volume 19. No 1.

Gita Agustiningrum (2019). Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Di Kabupaten Indragiri Hilir. VOL 6, Edisi 1 Januari.

Oky Aditya Pranata (2017). Pengelolaan Alokasi Anggaran Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Di Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014. VOL 4, NO 1.

Akib,H.(2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik. Volume 1, No 1.

Tengku Rajib Huda (2016). Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Kelurahan (PPIDK) Kasus Desa Kuala Panduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014.VOL 3, NO. 2.

Anisah, Siti, & Sujianto. (2019). Implementasi Program Sistem Informasi Desa (SID) Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. JOM FISIP UNRI. Vol.6 Edisi II.

Petunjuk Teknis Orasional Proram Desa Maju Inhi Jaya (DMIJ)

Media Massa

Bupati INHIL. (2015). *Peraaturan Bupati Indragiri Hilir Nmor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya*. Tembilahan: Kab. INHIL.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ).

Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 Tentang